



IMPLEMENTASI PROGRAM TNI MANUNGGA MEMBANGUN DESA OLEH TNI AD KODIM 0410/KBL SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANJANG, KOTA BANDAR LAMPUNG

Lies Kumara Dewi¹, Eka Ubaya Taruna Rauf²

¹Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

²Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Informasi Artikel

Article history:

Received 09, 08, 2024

Revised 13, 09, 2024

Accepted 25, 10, 2024

Kata Kunci:

Program

TNI

Desa

Percepatan

Pembangunan

ABSTRAK

Program TMMD adalah sebuah inisiatif bersama antara TNI Angkatan Darat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mempercepat laju pembangunan, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan. Melalui program ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan. Kegiatan TMMD tidak hanya mencakup pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya, tetapi juga mencakup kegiatan non-fisik seperti penyuluhan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara TNI, pemerintah daerah, masyarakat, serta instansi terkait. Melalui pembangunan berbagai infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, TMMD diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah. Contoh nyata dari program ini adalah pelaksanaan TMMD di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, yang melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, Dinas PU, dan tokoh masyarakat. TNI bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat bahu-membahu membangun desa. Kegiatan fisik dan non-fisik yang dilaksanakan dalam TMMD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempererat tali silaturahmi antara TNI dan rakyat.

JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik *This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



Corresponding Author:

Lies Kumara Dewi

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, FISIP, Program Studi Administrasi Publik, Indonesia

Email: lieskumaradewi13@gmail.com

PENDAHULUAN

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan suatu upaya bersama antara TNI Angkatan Darat dan pemerintah daerah untuk memajukan wilayah-wilayah yang masih tertinggal, baik itu di daerah perbatasan, pedesaan, maupun perkotaan yang kumuh. Melalui program ini, diharapkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum dapat terlaksana dengan cepat, sehingga kesejahteraan masyarakat setempat dapat meningkat secara signifikan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, TNI memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, TNI dituntut untuk mempersiapkan pertahanan negara secara dini. Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut adalah melalui pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), seperti Pembinaan Teritorial (Binter) yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan TMMD.

Demi mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan lingkungan yang aman bagi seluruh warga, khususnya masyarakat di wilayah pedesaan yang masih tertinggal, TNI secara aktif menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah serta berbagai lembaga terkait. Program TMMD ini secara konsisten berupaya untuk memberantas permasalahan kemiskinan yang masih menjadi isu krusial di berbagai daerah.

Pelaksanaan program TMMD mengombinasikan pembangunan infrastruktur fisik dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pembangunan fisik, seperti sistem irigasi dan jalan, bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara langsung. Di sisi lain, kegiatan non-fisik yang berfokus pada penyuluhan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara tidak langsung dengan cara memberdayakan mereka untuk mengembangkan potensi diri dan keterampilan hidup. Kerja sama yang solid

antara TNI Angkatan Darat, pemerintah kota, kecamatan, dan warga Kelurahan Ketapang dalam program TMMD telah membuahkan hasil yang nyata. Berbagai perbaikan, baik di bidang lingkungan maupun infrastruktur, telah berhasil dicapai. Program ini juga menjadi sarana yang efektif untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa kebersamaan di antara seluruh lapisan masyarakat.

Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, yang menjadi sasaran TMMD, merupakan daerah dengan permasalahan sosial yang cukup kompleks. Tingginya tuntutan ekonomi dan kurangnya kesempatan kerja mendorong sebagian masyarakat, terutama perempuan, untuk terlibat dalam praktik prostitusi. Kondisi ini diperparah dengan minimnya fasilitas umum, kondisi lingkungan yang kurang bersih, serta kurangnya tempat tinggal yang layak. Parahnya, praktik prostitusi ini sering kali terjadi di lingkungan perumahan warga, sehingga berdampak negatif pada stigma sosial dan masa depan generasi muda.

Program TNI Manunggal Membangun Desa menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi kendala anggaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan melibatkan TNI secara langsung, kegiatan ini dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada. Namun, perlu diakui bahwa masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang belum memberikan dukungan maksimal, seperti keterlambatan dalam memenuhi kebutuhan logistik. Hal ini dapat menghambat kelancaran pelaksanaan program dan mengurangi efektivitasnya.

Untuk mengukur keberhasilan suatu program, evaluasi merupakan langkah krusial. Hasil evaluasi ini akan menjadi acuan perbaikan pada pelaksanaan program selanjutnya. Program TMMD, misalnya, akan berjalan optimal jika seluruh pihak terkait TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat bersinergi dengan baik. Kunci keberhasilan sinergi ini terletak pada koordinasi yang solid, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan program. Hal ini sangat

penting karena keberhasilan TMMD tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga bagi pemerintah daerah.

Mengacu pada permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung yang diinisiasi oleh Kodim 0410/KBL Bandar Lampung, dan (2) Mengevaluasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Kodim 0410/KBL Bandar Lampung dalam rangka meningkatkan pembangunan di Kelurahan Ketapang.

Program TNI Manunggal Membangun Desa. Pengertian program menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan. Menurut (Suharsimi, 2012), program merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Sedangkan (Wholey, *et.al.*, 1994) berpendapat bahwa program adalah seperangkat sumber daya dan kegiatan yang diarahkan pada satu atau lebih tujuan bersama. Secara umum, program dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai hasil yang diinginkan. Program melibatkan alokasi sumber daya yang optimal dan pelaksanaan kegiatan yang terstruktur. Baik dalam konteks akademis maupun praktis, program selalu diarahkan pada tujuan-tujuan spesifik.

Manunggal merujuk pada suatu kondisi kesatuan yang sempurna, di mana semua elemen saling terkait dan bekerja sama secara sinergis. Kemanunggalan TNI-Rakyat merupakan manifestasi dari hubungan yang erat dan tak terpisahkan antara TNI dan rakyat, yang dilandasi oleh komitmen bersama untuk mewujudkan ketahanan nasional.

TMMD adalah sebuah program kolaborasi yang melibatkan TNI dan berbagai instansi pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan yang masih tertinggal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembangunan. Sesuai dengan mandatnya, TNI melalui program TMMD aktif berperan dalam pembangunan nasional. Program ini difokuskan pada upaya membantu pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan, seperti kerusakan akibat bencana alam, keterbatasan infrastruktur, serta konflik sosial.

Program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan TNI, awalnya dikenal sebagai ABRI Masuk Desa (AMD) pada masa kepemimpinan Jenderal Muhammad Yusuf. Seiring berjalannya waktu dan reformasi, program ini kemudian bertransformasi menjadi Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Pelaksanaan TMMD oleh TNI-AD Kodim 0410/KBL umumnya dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu:

(1) Kegiatan Karya Bhakti meliputi perbaikan rumah warga, saluran air, jalan, dan jembatan di desa. Program ini bersifat tambahan, disesuaikan dengan permintaan pemerintah daerah, sehingga tidak semua wilayah melaksanakannya. Personel yang terlibat biasanya hanya dari Koramil atau Kodim setempat, dengan skala pekerjaan yang lebih kecil untuk Karya Bhakti reguler atau perkotaan, dan

(2) Sebagai bentuk bakti sosial, TNI sering melaksanakan Karya Bhakti yang mencakup renovasi rumah tidak layak huni, perbaikan saluran drainase, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan di daerah pedesaan. Program ini bersifat fleksibel, dijalankan atas permintaan pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, tidak semua daerah melaksanakan Karya Bhakti. Pelaksanaan Karya Bhakti biasanya melibatkan personel dari Koramil atau Kodim setempat, dengan skala pekerjaan yang lebih terbatas untuk Karya Bhakti reguler atau yang dilaksanakan di wilayah perkotaan.

Indikator Pembangunan TNI Manunggal Membangun Desa. TNI Manunggal Membangun Desa terfokuskan pada 2 (dua) pembangunan, menurut (Kuncoro, 2013) yakni:

Pembangunan Fisik. Pembangunan fisik adalah segala bentuk pembangunan yang bisa dilihat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Ini mencakup pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung, dan fasilitas umum lainnya. Kegiatan Manunggal TNI, misalnya, seringkali fokus pada pembangunan fisik ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan.

Pembangunan Non Fisik. Pembangunan non-fisik lebih berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Jenis pembangunan ini tidak selalu terlihat secara fisik, melainkan lebih kepada perkembangan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Pembangunan non-fisik ini melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, dengan tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Kami memilih metode penelitian kualitatif deskriptif untuk penelitian ini. Sesuai dengan pendapat (J.R Raco, 2010), metode ini memungkinkan kami untuk terlibat langsung dalam situasi yang kami teliti. Data yang kami peroleh pun bersifat deskriptif, berupa kata-kata dan gambar, bukan angka-angka. Hal ini sejalan dengan karakteristik penelitian deskriptif yang dijelaskan oleh (Moelong, 2014).

Wawancara, Kami akan berinteraksi secara tatap muka dengan anggota TNI-AD Kodim 0410/KBL dan warga Kelurahan Ketapang untuk menggali informasi mendalam mengenai pelaksanaan program TMMD.

Observasi, yaitu Melalui pengamatan, kami akan mengumpulkan data kualitatif yang dapat memperkaya pemahaman kami tentang pelaksanaan program di lapangan.

Telaah dokumentasi dan kepustakaan, yaitu Kami akan mempelajari berbagai dokumen, laporan, dan literatur terkait program TMMD untuk memperoleh

landasan teori dan pemahaman yang lebih komprehensif.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini bermaksud untuk menginvestigasi, menganalisis, dan menyajikan gambaran komprehensif mengenai implementasi program TMMD oleh Kodim 0410/KBL dalam rangka mendorong pembangunan di wilayah Kelurahan Ketapang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai bagian integral dari tugas pokoknya, TNI secara aktif terlibat dalam pembangunan desa melalui program Manunggal Membangun Desa. Program ini bukan hanya sekadar kegiatan fisik, namun juga merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, TNI berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempererat tali silaturahmi antara TNI dan rakyat.

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi kendala anggaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TMMD dapat menghemat biaya pembangunan. Sayangnya, pelaksanaan TMMD seringkali kurang maksimal karena kurangnya dukungan penuh dari pemerintah daerah. Hal ini terbukti dari keterlambatan penyediaan berbagai kebutuhan yang diperlukan selama kegiatan TMMD berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator pelaksanaan kegiatan program TMMD antara lain perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

Perencanaan.

Berdasarkan wawancara dengan Mayor Inf. Sinaga (Danramil), bahwa perencanaan program TNI Manunggal Membangun Desa biasanya ditentukan 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan TMMD dimulai, akan tetapi masih terdapat kesulitan dalam menentukan prioritas sasaran program, karena pemerintah daerah sebagai penentu program pembangunan di daerah masih kurang

maksimal dalam melibatkan semua instansi terkait sehingga instansi terkait yang merasa tidak dilibatkan tidak mengikutsertakan tenaga ahlinya.

Berdasarkan wawancara dengan Sertu Yudha Saputra (Babinsa), menyatakan bahwa penentuan program merupakan langkah awal dari program TNI Manunggal Membangun Desa yang ditentukan 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan TMMD, kemudian dilakukan koordinasi. Setelah rancangan ditentukan dan Komando Atas turun, langkah selanjutnya adalah mensinkronkan program tersebut dengan program pemerintah daerah dan membuat rencana awal dengan menentukan strategi penetapan tujuan. Selanjutnya Pemkot akan aktif menjalani *survey* lapangan sesuai dengan prioritas keperluan pengguna masyarakat dan anggaran yang ada.

Setelah program dari Komando Atas turun, selanjutnya adalah kegiatan koordinasi untuk mensinkronkan program yang ada dengan program pemerintah daerah. Hal yang seringkali terjadi adalah lambatnya keputusan dari pejabat pemerintah daerah padahal kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan dimulai dengan harapan pemkot dapat memasukkan program tersebut ke dalam anggaran tahun berikutnya sehingga pemkot mempunyai waktu yang cukup dalam perencanaan terutama dalam segi alokasi anggaran.

Menurut Pawzy Ketua RT Kelurahan Ketapang, pada saat peninjauan medan seharusnya dilakukan pengecekan secara rinci dan harus melibatkan semua instansi yang terkait agar dalam menentukan sasaran dapat disesuaikan dengan alokasi waktu dan dana yang tersedia untuk kelancaran pelaksanaan TMMD. Akan tetapi, seringkali pemkot kurang melibatkan instansi yang terkait pada saat peninjauan medan sehingga ada sasaran yang tidak sesuai dengan masyarakat setempat dan akhirnya tidak dapat digunakan oleh masyarakat.

Terkait dengan penentuan rencana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Ketapang, Mayor Inf. Sinaga

(Danramil) menyatakan bahwa agar pelaksanaan program TMMD di Kelurahan Ketapang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung berjalan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan maka perlu dilakukan peninjauan lokasi dan pengecekan secara detail yang melibatkan seluruh instansi terkait sehingga penentuan sasaran dapat disesuaikan dengan alokasi waktu dan dana yang tersedia.

Selanjutnya, menurut Sertu Yudha Saputra (Babinsa), Skala prioritas pembangunan di Kelurahan Ketapang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung adalah kebutuhan tempat tinggal yang kurang layak, minimnya ketersediaan fasilitas umum dan yang paling menjadi sorotan adalah adanya praktik prostitusi yang berkembang di lingkungan warga Kelurahan Ketapang.

Tahap perencanaan ini termasuk juga mengidentifikasi masalah dan menentukan bagian wilayah mana yang sesuai dengan pembangunan kelurahan. Hal ini dilakukan dengan cara pengecekan secara detail dan melibatkan seluruh instansi terkait penargetan dapat disesuaikan dengan waktu dan dana yang tersedia. Pengecekan fisik di lapangan sangat penting dilakukan agar TMMD oleh TNI-AD Kodim 0410/KBL dalam upaya meningkatkan pembangunan di Kelurahan Ketapang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung berhasil dilaksanakan.

Tahap akhir dari perencanaan TMMD ditandai dengan sebuah forum presentasi yang dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat. Dalam forum ini, rancangan kegiatan TMMD disajikan secara detail, termasuk solusi yang telah ditemukan untuk mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul. Melalui presentasi ini, diharapkan dapat teridentifikasi kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki sebelum pelaksanaan TMMD dimulai.

Persiapan.

Persiapan merupakan penetapan pelaksanaan program yang akan dilaksanakan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi dan/atau publikasi program, dan

pembekalan yang akan digunakan dalam pelaksanaan program. Terkait dengan persiapan pelaksanaan program TMMD di Kelurahan Ketapang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung adalah:

(a) Melakukan Pra TMMD di Kelurahan Ketapang kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung mengingat waktunya sangat terbatas yaitu hanya 21 (dua puluh satu) hari sedangkan sasarannya cukup banyak dan personel yang terlibat terbatas (Berdasarkan wawancara dengan Mayor Inf. Sinaga, Danramil).

(b) Persiapan sarana dan prasarana sejak dini untuk mengurangi hambatan yang akan dihadapi di lapangan seperti persiapan alat peralatan kerja (Berdasarkan wawancara dengan Sertu Yudha Saputra, Babinsa).

Tahap persiapan TMMD di Kelurahan Ketapang menghadapi beberapa kendala. Menurut Muhaimin, salah satu warga, minimnya pelaksanaan pra-TMMD membuat program tidak berjalan sesuai target. Sementara itu, H. Busro menyampaikan bahwa keterlambatan peralatan di lokasi menjadi penghambat utama kelancaran kegiatan.

Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu Pembangunan Fisik, yaitu pembangunan yang ditujukan untuk membangun fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dan Pembangunan Non Fisik, yaitu pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia

Pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa oleh TNI-AD 0410/KBL dalam upaya meningkatkan pembangunan di Kelurahan Ketapang Kecamatan panjang Kota Bandar Lampung adalah :

Pembangunan Fisik. Pembangunan fisik yang dilakukan antara lain: Pembangunan fasilitas umum (MCK), membangun tempat tinggal layak huni, membangun tempat kebersihan lingkungan yang berkaitan dengan sampah seperti membuat bak sampah permanen agar

sampah tidak berserakan dimana-mana, dan memperbaiki jalan yang berlubang.

Pembangunan Non Fisik. Pembangunan Non Fisik yang dilakukan antara lain:

Pengarahan/Penyuluhan. Proses pemberian informasi dan pemahaman kepada masyarakat secara luas, dengan tujuan membentuk pola pikir yang positif dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Bimbingan/Pembinaan. Kegiatan pendampingan yang lebih terfokus pada kelompok tertentu, dengan tujuan memperbaiki perilaku dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Contohnya, pembinaan tentang kebersihan lingkungan dan bela negara yang melibatkan kerjasama TNI dan Polri.

Pelatihan. Program pengembangan keterampilan praktis yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, pelatihan kesehatan dan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan Tenaga Kerja untuk mengatasi masalah sosial seperti prostitusi.

KESIMPULAN

Kolaborasi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui program TNI Manunggal Membangun Desa di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, bertujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat.

Program TNI Manunggal Membangun Desa yang diinisiasi oleh Kodim 0410/KBL merupakan upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Ketapang. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari dukungan aktif dari semua komponen masyarakat dan pemerintah.

REFERENSI

J.R. Raco. (2010) Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. PT Gramedia

- Widiasarana Indonesia atau Grasindo.
- Kuncoro. (2013) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Penerbit : Erlangga, Jakarta.
- Lexy J. Moelong. (2014) Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya,. Bandung.
- Suharsimi, A. (2012) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. PT Rineka cipta. Jakarta.
- Susanto, A. (2023). Dampak program TMMD terhadap pembangunan infrastruktur desa: Studi kasus di Kelurahan Ketapang, Kota Bandar Lampung. *Jurnal Pembangunan Desa*, 15(2), 45-60.
- Wholey, et.al. (1994) Evaluasi program, TMMD dan pemberdayaan masyarakat. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.